

SKRIPSI
STRATEGI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MOYO KECAMATAN MOYO
HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana Starata satu (S1) pada program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



OLEH :

Khairurrosikin
NIM.216130018

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

2020





SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRURROSIKIN

NIM : 216130018

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020



KHAIRURROSIKIN
NIM. 216130018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.ljib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : khairurroqin
NIM : 216130018
Tempat/Tgl Lahir : Moyo, 26 September 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOl
No. Hp/Email : 085 339 428 869
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi
Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa
Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin, 14 September 2020

Penulis



khairurroqin
NIM. 216130018

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Motto”

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

” (Q.S.Ar-Ra'd:11)”

” Persembahan ”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ الله “Rabb Pemberi semua nikmat kepadaku”
- ❖ رسوله “Muhammad, Rasul-ku dan rasul seluruh orang beriman, sholawat dari kami semua kepada mu, kami mencintaimu, yaa... الله pertemukan kami dengannya”
- ❖ المؤمنون semua kalian, ku tak mampu menyebutkan satu per satu,
 - ♥ Orang tuaku tercinta (Alamuddin dan Sumini) yang selama ini telah banyak berkorban tanpa kenal lelah membantu dan memberikan dukungan, baik secara material maupun moral, sehingga ungkapan terima kasih atas setiap tetesan keringat dan curahan kasih sayang serta do'a tulus yang tiada hentinya menyinari sanubariku sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
 - ♥ Buat kakak tercinta Rizkiyah Khairani S.Pd memberikan motivasi dan do'anya selama ini.
 - ♥ Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Drs.amil,M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun proposal.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Alamuddin dan Mama Sumini yang sangat berjasa dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Kakak saya tersayang Rizkiyah Khairani S.Pd, terimakasih telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti.

7. Untuk Untuk Anwar, Elin elnawati, Mario del rosario, Dewi armita maulidyani, Ernawati, Firmansyah, Burhannudin, Rusalim, Imam, selaku Sahabat saya yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Untuk Semua teman-teman Studi Pemerintahan angkatan 2016 atas kerja samanya. dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi .

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun proposal, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Agustus 2020
Penulis,

Khairurrosikin
216130018

**STRATEGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MOYO KECAMATAN MOYO
HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

Oleh :
Khairurrosikin

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Skripsi, September 2020

ABSTRAK

Sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menetapkan sebuah program yaitu mengawasi Alokasi Dana Desa. Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat Desa Moyo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Moyo dan juga untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Strategi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Moyo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Strategi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Moyo mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat, namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti strategi Organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya. Namun dalam pelaksanaan program tidak berjalan optimal karena rendahnya kualitas SDM terhadap kegiatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Moyo.

Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan Masyarakat, BPD

**THE STRATEGY OF THE CONSULTATIVE BODY IN EXAMINING THE
VILLAGE FUND ALLOCATION TO IMPROVE THE COMMUNITY
INCOME, MOYO HILIR DISTRICT, SUMBAWA, 2018**

By:
Khairurrosikin

Governmental Science Program
Faculty of Social and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram
Thesis, September 2020

ABSTRACT

To improve the community's economy, the Village Consultative Body establishes a program that oversees Village Fund Allocation. This program is expected to provide a change in the Moyo Village community life. The purpose of this study was to describe the Strategy of the Village Consultative Body in Overseeing Village Fund Allocation to Improve the Economy of the Moyo Village Community and also to analyze the factors that affect the Strategy of the Village Consultative Body in Moyo Village. This research used descriptive qualitative. The data collection techniques used were through interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, in general, the Strategy of the Village Consultative Body in Moyo Village can improve the welfare and economy of the local community. Still, in its implementation, it is influenced by many factors such as organizational strategy, program strategy, and resource support strategy. However, the performance of the program did not run optimally due to the low quality of human resources for the activities of the Village Consultative Body (BPD) in Moyo Village.

Keywords: Strategy, Community Empowerment, BPD

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Husnana, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2. Tinjauan Teori | 13 |
| 2.2.1. Definisi Strategi | 13 |
| 1) Fungsi Strategi..... | 13 |
| 2) Bentuk-Bentuk Strategi | 14 |
| 3) Tipe-Tipe Strategi..... | 15 |
| 2.2.2. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 16 |

| | |
|---|----|
| 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 17 |
| 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 19 |
| 2.2.3 Definisi Pemberdayaan Masyarakat..... | 19 |
| 2.2.4 Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 22 |
| 2.2.5. Definisi Pengawasan | 22 |
| 1) Fungsi Pengawasan..... | 23 |
| 2) Teknik-Teknik Pengawasan | 24 |
| 2.2.6. Definisi Desa | 26 |
| 1) Jenis-Jenis Desa | 28 |
| 2) Keuangan Desa..... | 30 |
| 2.2.7. Definisi Alokasi Dana Desa | 32 |
| 1) Tujuan Alokasi Dana Desa | 33 |
| 2) Manfaat Alokasi Dana Desa | 34 |
| 2.2.8. Pengertian Perekonomian Masyarakat Desa | 35 |
| 1) Faktor Pengaruh Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa..... | 36 |
| 2) Sektor yang Menompang Ekonomi Masyarakat Desa | 38 |
| 3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa | 40 |
| 2.3. Kerangka Berfikir..... | 45 |
| 2.4. Definisi Konseptual..... | 45 |
| 2.4. Definisi Operasional..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian | 50 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 50 |
| 1) Lokasi Penelitian | 50 |
| 2) Waktu Penelitian..... | 51 |
| 3.3. Informan Penelitian | 51 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| 1) Wawancara | 52 |
| 2) Observasi | 52 |
| 3) Dokumentasi..... | 52 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 3.5. Sumber Data | 53 |
| 1) Sumber Data Primer | 53 |
| 2) Sumber Data Sekunder | 54 |
| 3.6. Analisis Data..... | 54 |
| 1) Reduksi Data..... | 54 |
| 2) Penyajian Data..... | 55 |
| 3) Penarikan Kesimpulan..... | 55 |

BAB IV METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 4.1.Deskripsi lokasi penelitian | 56 |
| 4.1.1.Gambaran umum Desa Moyo | 56 |
| 4.1.2.Visi dan Misi..... | 57 |
| 4.1.3.Kependudukan Desa Moyo | 59 |
| 4.1.4.Lembaga Pemerintahan | 60 |
| 4.1.5.Batas Wilayah | 62 |
| 4.1.6.Kondisi Ekonomi | 62 |
| 4.1.7.Sarana dan Prasarana Desa Moyo | 63 |
| 4.2.Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 65 |
| 4.2.1.Strategi Organisasi | 65 |
| 4.2.1.1.Perumusan Misi dan Tujuan | 67 |
| 4.2.1.2.Sosialisasi..... | 70 |
| 4.2.2.Strategi Program..... | 72 |
| 4.2.2.1.Dampak | 75 |
| 4.2.3.Strategi Pendukung Sumber Daya | 77 |
| 4.2.3.1.Prasarana | 79 |
| 4.2.3.2.SumberDaya Manusia..... | 81 |
| 4.3. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat | 84 |
| 4.3.1.Kesejahteraan..... | 84 |
| 4.3.1.1.Peningkatan Kualitas Hidup..... | 87 |
| 4.3.2.Akses | 91 |
| 4.3.2.1.Ketersediaan Sumber Daya | 93 |
| 4.3.3.Partisipasi | 96 |
| 4.3.3.1.Keterbukaan Lembaga dalam Pembuatan Kebijakan | 98 |

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan 102
5.2.Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 8 |
| Tabel 4.1 | Data Jumlah Penduduk..... | 59 |
| Tabel 4.2 | Data Pemeintahan..... | 60 |
| Tabel 4.3 | Data BPD | 61 |
| Tabel 4.4 | Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Moyo..... | 62 |
| Tabel 4.5 | Data sarana Desa Moyo | 63 |
| Tabel 4.6 | Strategi BPD | 65 |
| Tabel 4.7 | Misi dan tujuan BPD..... | 68 |
| Tabel 4.8 | Strategi Sosialisasi BPD..... | 70 |
| Tabel 4.9 | Strategi Program BPD..... | 73 |
| Tabel 4.10 | Dampak Strategi BPD..... | 75 |
| Tabel 4.11 | Strategi Pendukung Sumber daya BPD | 77 |
| Tabel 4.12 | Prasarana BPD Desa Moyo..... | 79 |
| Tabel 4.13 | Strategi SDM BPD..... | 81 |
| Tabel 4.14 | Data tingkat pendidikan pengurus BPD..... | 82 |
| Tabel 4.15 | Strategi BPD dalam mengawasi ADDes Untuk meningkatkan perekonomian terhadap kelembagaan | 85 |
| Tabel 4.16 | Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Moyo..... | 88 |
| Tabel 4.17 | Ferivikasi jenis bantuan yang di terimaoleh klompok masyarakat | 89 |
| Tabel 4.18 | Keterlibatan Bank dalam pelaksanaan program BPD..... | 91 |
| Tabel 4.19 | Tim Penggerak BPD | 93 |
| Tabel 4.20 | Pengurus BPD | 94 |
| Tabel 4.21 | Strategi dalam peningkatan partisipasi..... | 96 |
| Tabel 4.22 | Daftar hadi Forum yasinan..... | 99 |

Tabel 4.23 Tim Schedule kegiatan rapat tahun 2018..... 100



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Kerangka Berfikir..... | 47 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Desa Moyo..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Anwas, 2013:4, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat

menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang di sebabkan beberapa faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup Desa (Hanif Nurcholis, 2005:140).

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu

kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki 24 Kecamatan, 8 Kelurahan dan terdiri atas 157 desa. (sumbawakab.go.id diakses pada 13 Desember 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2014 jumlah penduduk tercatat 509.234 jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, tidak menutup kemungkinan berpotensi menyumbangkan berbagai macam permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat, diantaranya seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan permasalahan kesejahteraan. (bps Sumbawakab.go.id. di akses pada 13 Desember 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Terkait dengan pengelolaan ADD di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir yaitu sebesar Rp. 140,037,000. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya strategi BPD sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa.

Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Nantinya alokasi kinerja ini dipergunakan oleh pemerintah desa untuk mempercepat penyediaan infrastruktur public dan penguatan kualitas public termasuk meningkatkan daya asing melalui perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Alokasi kinerja ini juga dapat di manfaatkan untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa melalui Bimtek, dan pembinaan perangkat desa serta

penguatan pemberdayaan masyarakat. (Sumbawakab.go.id. diakses pada 15 Desember 2019).

Sebagai salah satu desa yang menerima dan memanfaatkan Dana Desa, pemerintah Desa Moyo mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud dari keberhasilan pembangunan tersebut, pada tahun 2018 Desa Moyo terpilih sebagai penyelenggara Festival Varoso antar sekecamatan yang ada di Kecamatan Moyo Hilir. Kegiatan lomba tersebut juga sebagai tolak ukur dalam melihat efektifitas dalam membangun desa/kampung melalui pemberdayaan masyarakat. (Sumbawakab.go.id. diakses pada 15 Desember 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan meneliti tentang **"Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Megawasi Alokas Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2018"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah strategi BPD dalam mengawasi Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi strategi BPD dalam mengawasi Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi BPD dalam mengawasi Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi BPD dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sunmbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademik

Sebagai syarat dan tugas ahir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu(S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Moyo dalam strategi BPD dalam mengawasi Alokasi Dana Desa.
- b. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang pentingnya partisipasi dalam meningkatkan pembangunan daerah.

1.4.3 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan desa.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| NO | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Relevansi | Critical Point |
|----|--|---|---|--|--|
| 1 | Novita Lenak, Joyce J. Rares dan gustaf Tampi (2015) | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa | Evaluasi kegiatan dilakukan pemerintah dengan mengadakan rapat Desa, namun rapat Desa yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat pembangunan yang sudah selesai Disisi lain pemanfaatan hasil masih ada program Desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti puskesmas Desa yang saat ini tidak lagi digunakan. Semenjak perawat yang tinggal di situ di pindah tugaskan, | Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama berbicara mengenai Alokasi Dana Desa hanya saja yang membedakan adalah penelitian tersebut di fokuskan kepada pengelolaan. | Diharapkan pemerintah harus melibatkan masyarakat dan pemerintah memanfaatkan ADD dengan baik. |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan keadaan puskesmas tersebut tidak terawat. | | |
| 2 | Ade Irma (2015) | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi | Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan. | Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama berbicara mengenai Alokasi Dana Desa hanya saja yang membedakan adalah penelitian tersebut difokuskan kepada Akuntabilitas. | Diharapkan pemerintah dan pengelola ADD harus sesuai dengan peraturan daerah. |
| 3 | Nurul Syapri Akhdiyati(2015) | Strategi Penguatan Partisipasi dan | Upaya peningkatan kapasitas Desa tidak bisa di bebaskan sepenuhnya pada ADD, | Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian | Kepada pemerintah desa tidak seharusnya di |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|--|
| | | <p>Kapasitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas</p> | <p>melainkan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya peran ADD dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan, kapasitas pemerintahan, kapasitas kemasyarakatan dan kapasitas ruang. Strategi inti untuk memperkuat kapasitas dan kapasitas Desa dalam pengelolaan ADD meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan amanat undang- undang; (b) mewujudkan program unggulan Desa berdasarkan hasil musrenbang; (c) meningkatkan kapasitas Desa melalui program ADD pemerintah dengan CSR PT NTT; dan (d) memaksimalkan peran stakeholder (terutama anggota DPR) dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran.</p> | <p>ini sama-sama berbicara mengenai Alokasi Dana Desa hanya saja yang membedakan adalah penelitian tersebut di fokuskan kepada Strategi Penguatan Partisipasi dan Kapasitas Dalam Pengelolaan.</p> | <p>beban kan ke ADD karena kapasitas ADD di desa Sekongkang Atas terlalu minim</p> |
| 4 | Husin Sulmin (2015) | <p>Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD)</p> | <p>Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam penggunaan ADD dimulai dari tahapan perencanaan,</p> | <p>Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama berbicara mengenai</p> | <p>Kepada pemerintah dalam penggunaan ADD harus sesuai dengan hukum</p> |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>Pada Pemerintah Desa Dikabupaten Donggala</p> | <p>pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan ADD pada pemerintahan Desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban. Pengawasan dalam penggunaan ADD oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh BPD, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawsan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>Alokasi Dana Desa hanya saja yang membedakan adalah penelitian tersebut di fokuskan kepada Pertanggungj awaban.</p> | <p>administrasi penyelenggaraan pemerintah dan mengacu pada peraturan undang-undang. Untuk bagian pengawaasan ADD harus ada pertanggungjawaban pada pemerintah desa Kabupaten Donggala</p> |
| 5 | Risya Novita Sari, Heru | Pengelolaan Dana Desa | Pelaksanaan (ADD) di Desa ngasem masih kurang | Relevansi penelitian tersebut | Kepada pemerintah Desa |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | <p>Ribawanto, dan Mohamad said (2015)</p> | <p>Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri)</p> | <p>sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dan oleh Desa ngasem. Selain itu, perlu memperhatikan adanya faktor pendukung yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat Desa dan kecamatan, jumlah (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.</p> | <p>dengan penelitian ini sama-sama berbicara mengenai Alokasi Dana Desa hanya saja yang membedakan adalah penelitian tersebut di fokuskan kepada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat.</p> | <p>Ngasem perlu memperhatikan untuk pelaksanaan ADD nya dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik.</p> |
|--|---|--|---|--|---|

2.2 Tinjauan Teori

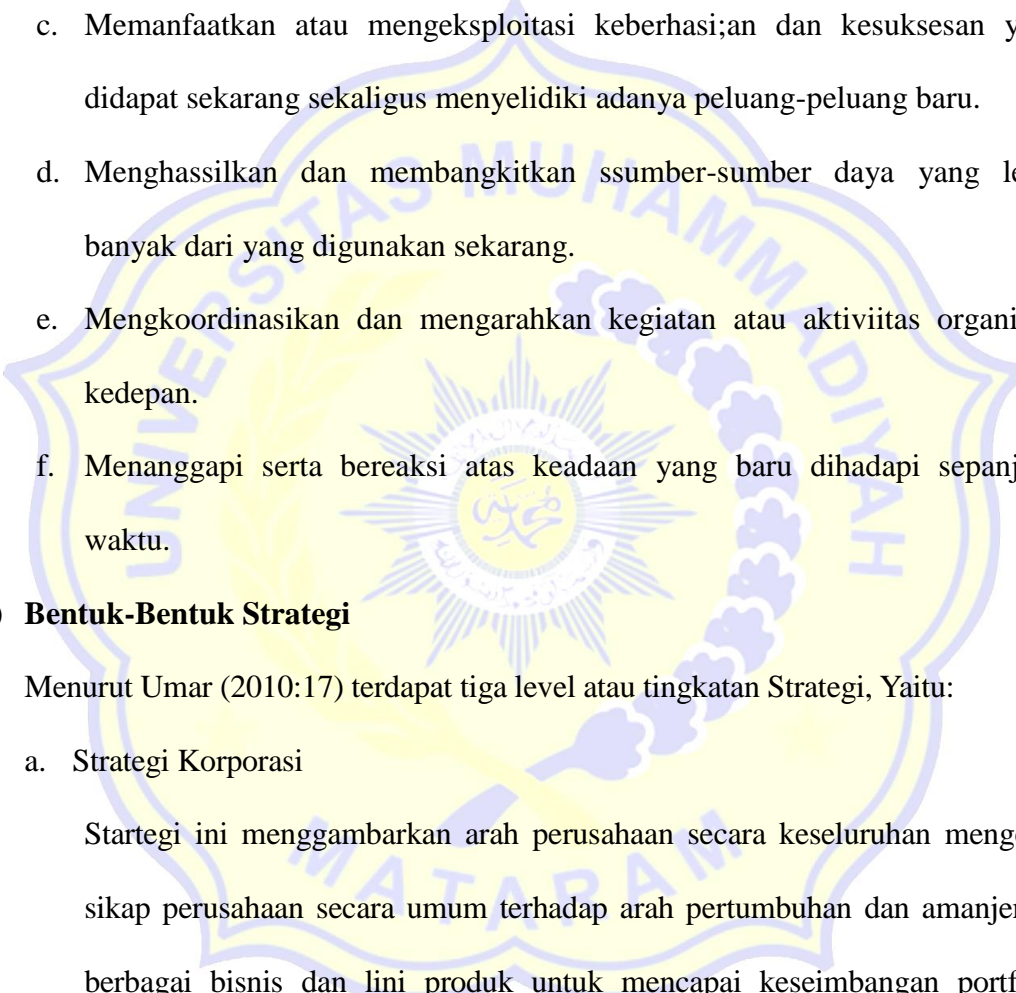
2.2.1 Definisi Strategi

Menurut Chandler dalam Umar (2010:16), Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Marrus dalam Umar (2010:16) yang mengatakan bahwa strategi merupakan suatu proses rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Definisi yang lebih khusus disampaikan oleh Hamel dan Prahalad dalam Umar (2010:17), strategi meruakan tindakan yang bersifat *Incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasakna sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti dalam bisnis yang dilakukan.

1) Fungsi Strategi

Menurut Assauri dalam Umar (2010:17) fungsi dari startegi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat ddi implementasikan ssecara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- 
- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin di capai kepada orang lain.
 - b. Menghubungkan dengan mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
 - c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
 - d. Menghassilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
 - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
 - f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

2) Bentuk-Bentuk Strategi

Menurut Umar (2010:17) terdapat tiga level atau tingkatan Strategi, Yaitu:

a. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portfolio produk dan jasa.

b. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam

industri atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan. Strategi bisnis yang di implementasikan biasanya merupakan salah satu strategi *overall cost leadership*.

c. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran. Sumberdaya manusia, keuangan, Produksi operasi mengembangkan strategi untuk menggabungkan bersama-bersama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.

3) Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

2.2.2 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Drs. Moch. Solekhan, MAP., 2014:76). BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Purwo Santoso, 2003:96)

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (Huda, 2015:215)

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

1) Peran Badan Permusyawaratan Desa

Adapun peran BPD dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Ali, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

- a. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehinggatujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya”.BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-

potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007:51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.2.3 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya Depdiknas (2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama Koentjaraningrat (2009:20). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidak berdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2010:34) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan

masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006:56).

UNICEF dalam Sunyoto Usman (2002:8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam :

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai

oleh mereka yang berada dikelas lebih tinggi disbanding mereka yang ada dikelas bawah.

3. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan sudah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan saran serta krtikan terhadap masalah yang dihadapi.

4. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah smeua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Daniel (2014) Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan

pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

- **Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Mardi (2000:1-2) Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem

politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi

- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai

2.2.5 Definisi Pengawasan

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Ismail Shaleh dalam (O.C. Kaligis, 2006:42), pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu.

Menurut Manullang (2002:173), mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan

tindakan penting guna mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam suatu organisasi tersebut. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin, agar jika terjadi kesalahan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien kembali.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengawasan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap saat baik selama proses manajemen berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

1) Fungsi Pengawasan

Menurut Belkoui (2000:35), fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksana.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mengontrol jalannya suatu prosedur kegiatan, dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2) Teknik – Teknik Pengawasan

Dalam Siagian (2008: 259–260) untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarah tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama

terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.

- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah parapelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya manajemen “segan” menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, di samping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan dengan untuk ditanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner

tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh pun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi implementasikan dengan baik atau tidak.

- d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dan kombinasi keduanya. Jika manajemen akan menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dalam rangka implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus memutuskan bentuk mana yang digunakan. Bentuk apapun yang digunakan, penting memperhatikan bahwa manaer hendaknya tidak “terjerumus” pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, cultural maupun keperilakuan. Tegasnya dalam wawancaram harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

2.2.6 Definisi Desa

Konsep Desa Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang -

Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo (Nurcholis 2011; 4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama sama memiliki kepentingan politik, ekonorai, sosial dan keamanan; memiliki susunan penguinis yang dipitila ore memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyclenggarkan w rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011; 4): Desa atau dengan anse aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "Badan Hukum" dan adalah pula Badan Pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayahh yang melingkunginya.

Dari uraian tersebut, peneliti menguraikan Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati olch masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

1) Jenis-Jenis Desa

Sugihen (2004: 25) membagi empat jenis desa. Keempat jenis desa tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Desa Sederhana (pra desu) Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya akan ditinggalkan lagi. Pola permukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. Hampir tak ada orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, karena semua penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila lahan sebagai sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang memadai.
- b. Desa Swadaya Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang bermukim secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih tradisional dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya masih berkaitan erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, beternak dan memelihara ikan di tambak-tambak kecil. Teknologi pertanian yang dipakai masih rendah, tenaga hewan dan manusia merupakan sumber utama energi teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) sering didasarkan dan diikat oleh adat istiadat yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai salah

satu indikator tipologi desa itu belum berkembang dan desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang memadai dan kurang terpelihara.

- c. Desa Swakarya Pada desa ini, adat yang menupakan tatanan hidup bermasyarakat soda mulai mendapatkan perubalan-perubahan sesusi dengan perbihan yang, sorjad dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi werlalu ketat mempengaruhi atau menentukin pola perilaku anguns musyardat. Lapangan pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripads di dess swadays Produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan schari-heri, letapi juga dhupayak air untuk blar ditukarkan dengan barang lain mels siste pasar. Produktivitas tenaga kerja bertambah melalui masukan teknologi dan prasarananya relatif sudah memadai dan terpelihara secara baik. Kendatipun jarang orang yang sudah menamatkan pendidikan sekolah menengah, namun rata rata orang telah menamatkan pelajaran Sekolah Dasar.
- d. Desa Swasembada Desa swasembada merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa yang terdahulu. Prasarana dess sudah baik, bentuk rumah bervariasi dan memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian sudah sangat bervariasi dan kebanyakan masyarakatnya tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang diusahakan sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah

masyarakat yang sudah terbuka dengan masyarakat di luar desanya, pengaruh dari luar itu terlihat dalam perilaku orang-orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih walaupun belum merata. Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak masyarakat yang menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan pesawat televisi warna dengan antena parabola. Serta banyak masyarakat yang sudah berpendidikan sarjana.

2) Keuangan Desa

Menurut M. Hadi dalam Soeradi (2014: 7), keuangan publik adalah semua hal dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7), mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Keuangan desa menurut pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah.

Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Desa.
- c. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%
- d. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dibagi untuk setiap desa secara proporsional, disebut Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.2.7 Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memeruhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan

lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

1) Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat deza dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekononti masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2) Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan sosial serta kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

2.2.8 Pengertian Perekonomian Masyarakat Desa

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya menggunakan pendekatan administratif, pengertian dalam undang-undang tersebut merujuk pada definisi secara fungsional. sehingga, dalam lingkungan Direktorat jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, dikenal istilah perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahannya menggunakan 'desa'.

Sedangkan menurut Suhardjo (2008: 32) dalam beberapa dekade terakhir mulai terjadi perubahan-perubahan definisi kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan mulai berubahnya tipologi kawasan perdesaan dan perkembangan kawasan perdesaan dalam beberapa waktu terakhir. Terutama setelah era globalisasi yang masuk ke perdesaan, telah terjadi interaksi dan negosiasi sosial budaya masyarakat perdesaan terhadap modernitas dan budaya luar. Faham dikotomi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan mulai ditinggalkan dengan tidak relevannya pemahaman tersebut dengan mulai biasnya perdesaan-perkotaan.

Dalam definisi kiasik, secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan perdagangan. Definisi tersebut masih banyak digunakan hingga saat ini.

Namunmunculnya kawasan pedesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisitersebut dirasa belum dapat mewakili keseluruhan tipologi kawasan pedesaan. Oleh karenanya muncul istilah-istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan pedesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi (Suhardjo, 2008: 46)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonomi pedesaan adalah ekonomi yang berdasarkan hasil produksi dari daerah pedesaan, biasanya bersifat tradisional. Pendapatan rumah tangga pertanian ditentukan oleh tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga kerja. Nilai sewa tanah sebagai penerimaan dari penguasaan aset produktif lahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan faktor produksi.

1) Faktor Pengaruh Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

Ada lima faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di desa (Ndraha, 2001: 43). Berikut ini kelima faktor tersebut:

- a. Sumber Daya Alam Yang Ada Faktor sumber daya alam yang ada sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Desa yang kaya akan sumber daya alam perekonomiannya akan lebih maju. Sumber daya alam ini bisa berupa kondisi tanah yang subur, kondisi laut yang banyak ikannya dan juga beberapa lainnya.
- b. Regulasi Dari Pemerintah Regulasi atau kebijakan dari pemerintah juga sangat berpengaruh pada ekonomi desa. Tentu saja masyarakat desa

mengharapkan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat desa. Kebijakan yang dianggap menguntungkan seperti subsidi pupuk dan penurunan pajak untuk petani.

- c. Jumlah Penduduk Desa Sadar atau tidak. jumlah penduduk desa juga mempengaruhi kesejahteraan. Masyarakat di desa umumnya lebih menyukai memiliki banyak anak dibandingkan masyarakat di kota. Jumlah anggota keluarga yang banyak ini secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi di desa.
- d. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Untuk urusan kualitas pendidikan. masyarakat desa masih jauh tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Padahal jelas jika tingkat pendidikan masyarakat desa mempengaruhi kondisi ekonomi pada masyarakat tersebut. Desa yang pendidikannya adalah maju, perekonomiannya akan mudah berkembang. Sebaliknya, desa yang pendidikannya kurang akan lesu dalam perekonomian.
- e. Adat Dan Tradisi Setempat Harus diakui jika adat dan tradisi setempat akan mempengaruhi bagaimana penduduk desa akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat desa yang memiliki adat dan tradisi yang mendukung kerja keras akan lebih mudah berkembang. Setiap desa tentunya memiliki adat dan tradisi masing-masing. Semua informasi lengkap seputar ekonomi masyarakat desa di atas sangat penting untuk diketahui. Bagaimanapun juga, kemajuan ekonomi masyarakat desa adalah

tanggung jawab bersana. Jika ekonomi di desa maju, maka rakyat akan sejahtera.

2) Sektor yang Menopang Ekonomi Masyarakat Desa

Memajukan perckonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perckonomian, jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semue sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.

Pada umumnya. ada 5 sektor yang menopang ekonomi masyarakat di desa (Theresia, 2014: 42). Jika kelima sektor ini mengalami kendala, maka akan membuat penurunan pendapatan ekonomi. Berikut ini kelima sektor tersebut dan penjelasannya:

a. Sektor Pertanian Sektor

pertanian adalah bidang! utama yang menjadi mata pncarian penduduk desa. Desa memberikan peranan yang sngat vital scbagai pertahanan pangan suatu negara. Kemajuan ekonomi dalam scktor portanian akan menghindarkan negara dari kondisi impor. Komoditi di pertanian ini beragam mulai dari padi, sayuran, dan jagung.

b. Sekter Peternakan

Selain betgantung pada sektor pertanian, ekonomi masyarakat desa juga bergantung pada sektor peternakan. Ada banyak peternakan yang ada di

desa desa. Semua peternakan ini biasanya masih bersifat konvensional. Beberapa binatang ditanak di desa seperti kambing, sapi, ayam, bebek dan beberapa jenis ikan tertentu.

c. Sektor Industri

Kreatif Industri kreatif nyatanya juga menjadi pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha dalam bidang kreatif di Indonesia. Industri kreatif ini biasanya akan menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan. Contoh komoditi dari industri ini seperti kursi rotan, tas dari bambu, sarung tenun dan beberapa komoditi lainnya.

d. Sektor Perikanan

Sektor perikanan berbeda dengan sektor peternakan. Pada sektor ini, masyarakat desa tidak melakukan kegiatan ternak untuk mendapatkan ikan melainkan langsung mencarinya di alam. Contoh pekerjaan pada sektor ini adalah nelayan yang mencari ikan di laut Oleh sebab itu, sektor ini biasanya berkembang di desa-desa yang berada pada kawasan pesisir

e. Sektor Pariwisata

Mayoritas tempat wisata yang ada di Indonesia berada di kawasan pedesaan. Tentu saja hal ini berimbas pada geliat ekonomi masyarakat yang ada di desa. Adanya tempat wisata di suatu desa akan menambah variasi mata pencaharian masyarakat desa Masyarakat desa yang tinggal di kawasan wisata biasanya bekerja sebagai pemandu dan penawaran jasa lainnya untuk wisatawan yang datang.

Itulah 5 sektor yang menopang perekonomian masyarakat desa. Kondisi perekonomian di desa juga dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor ini bahkan bersifat vital dan harus dijaga dengan baik.

3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa

Ekonomi masyarakat desa menjadi indikator keberhasilan perkembangan ekonomi sebuah negara. Hal itu karena bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa, yang hingga kini masyarakatnya masih jauh dari kesan maju. Dalam upaya memajukan desa peningkatan ekonomi masyarakat desa terlebih dahulu harus dilakukan oleh pemerintah (Suhardjo, 2008: 58). Upaya tersebut bisa ditakukan dengan menerapkan beberapa cara seperti:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Pertama, sudah diketahui umum jika infrastruktur adalah kunci utama kemajuan ekonomi sebuah desa. Namun sayangnya masih banyak sekali proyek infrastruktur desa yang terbengkalai dan tidak terselesaikan. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur menjadi poin penting sebuah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai memudahkan masyarakat desa untuk melakukan mobilitasi barang dan jasa keluar dan masuk desa. Kemajuan infrastruktur juga akan menarik minat investor untuk berinvestasi bagi kemajuan desa. Jika ada investasi maka pembangunan sarana transportasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi akan

semakin meningkat. Maka meningkatkan pembangunan infrastrukture sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

2. Memajukan Potensi Desa

Kedua, setelah masalah infrastruktur bisa teratasi maka selanjutnya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Jika menggunakan kejelian dalam mengamati kehidupan masyarakat desa, maka pasti akan ditemukan potensi besar yang dimiliki sebuah desa yang bisa dikembangkan. Pengembangan potensi desa ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa tentunya. Potensi pedesaan yang bisa dimajukan seperti berbagai kerajinan tangan, obyek wisata, hasil bumi, kekayaan kuliner semua potensi yang ada di desa. Pemerintah harus memegang peranan untuk mengontrol upaya memajukan potensi desa yang ada dan memberi fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat harus berperan aktif ikut memajukan potensi desa tempat tinggalnya sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.

3. Membangun Sumber Daya Manusia yang ada Di Desa

Ketiga, saatnya untuk memikirkan sumber daya manusia sebagai potensi besar untuk membantu proses percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Semua upaya untuk meningkatkan ekonomi tidak akan lepas dari sumber daya manusia di desa sebagai pelaku utama. Untuk itu embangsar: SDM sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sampai saat ini persoalan SDM di desa masih mejadi pekerjaan

rumah bagi pemerintah untuk disclesaikan. Presiden sudah menegaskan setelah masalah infrastruktur terselesaikan maka selanjutnya yang perlu dibenaisi adalah pembangunan SDMnya. Setelah semua teratasi maka ekenomi masyarakat desa akan mengalami peningkatan yang signifikan.

4. Memanfaatkan Teknologi

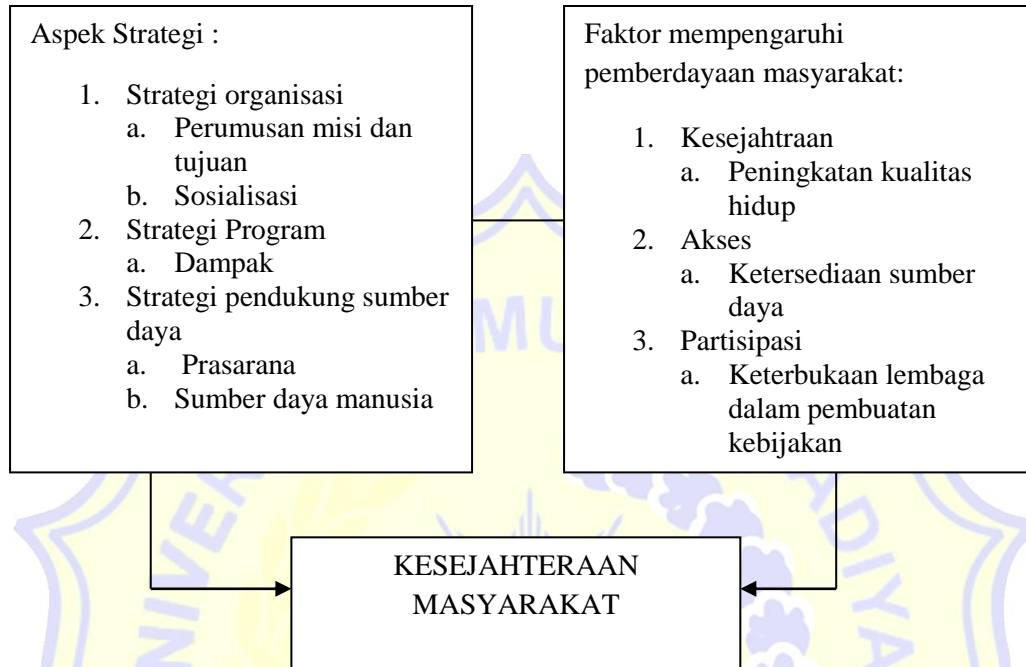
Keempat, setelah sumber daya manusia dibangun maka kini telah mampu ikut serta berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa lebih lanjut bisa memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan sebagai upaya peningkatan ekonominya. Memajukan ekonomi desa menggunakan teknologi pasti akan meberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa teknologi. Sebagai upaya promosi potensi yang dimiliki desa misalnya, bisa memanfaztkan tckrologi internet. Disinilah pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan koneksi internet bagi masyarakat desa. Selain teknologi internet masih banyak toknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Seperti misalnya teknologi pengolahan bahan makanan, pengawetan bahan makanan, packing dan lainnya Lantuk memasarkan potensi kuliner desa Pemerintah desa hanus pandai memberikan materi tentang teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakatnya.

5. Melakukan Proses Berkelanjutan

Kelima, ketika masyarakat desa sudah membenahi infrastruktur, memajukan potensi desa, meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi maka pemerintah tinggal menindak lanjuti. Pemerintah pusat atau desa tinggal memberikan program sebagai kelanjutan proses pembangunan ekonomi desa. Program yang diberikan harus bisa melibatkan semua elemen masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Selain itu program harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana sehingga semua elemen bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi desa. Program yang berkelanjutan adalah upaya pemerintah untuk menjaga eksistensi dari pemerintah sebagai fungsi pengawas dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Demikian adalah kunci sukses peningkatan ekonomi masyarakat desa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakatnya. Kemajuan masyarakat desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus pandai merangkul dan memfasilitasi masyarakat untuk memajukan desa bersama-sama.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2 Kerangka Berfikir



Sumber: Kooten dalam Salusu (2006:104-105), Setiawan (2003)

2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual (Moleong, 2007:29) adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

1. Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

a. *Corporate Strategy* (Strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF dalam Sunyoto Usman (2002:8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam :

a. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

b. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di kelas bawah.

c. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan sudah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan saran serta kritik terhadap masalah yang dihadapi.

d. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya

segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional (Moleong, 2007:29) adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan kerangka berpikir peneliti, yaitu :

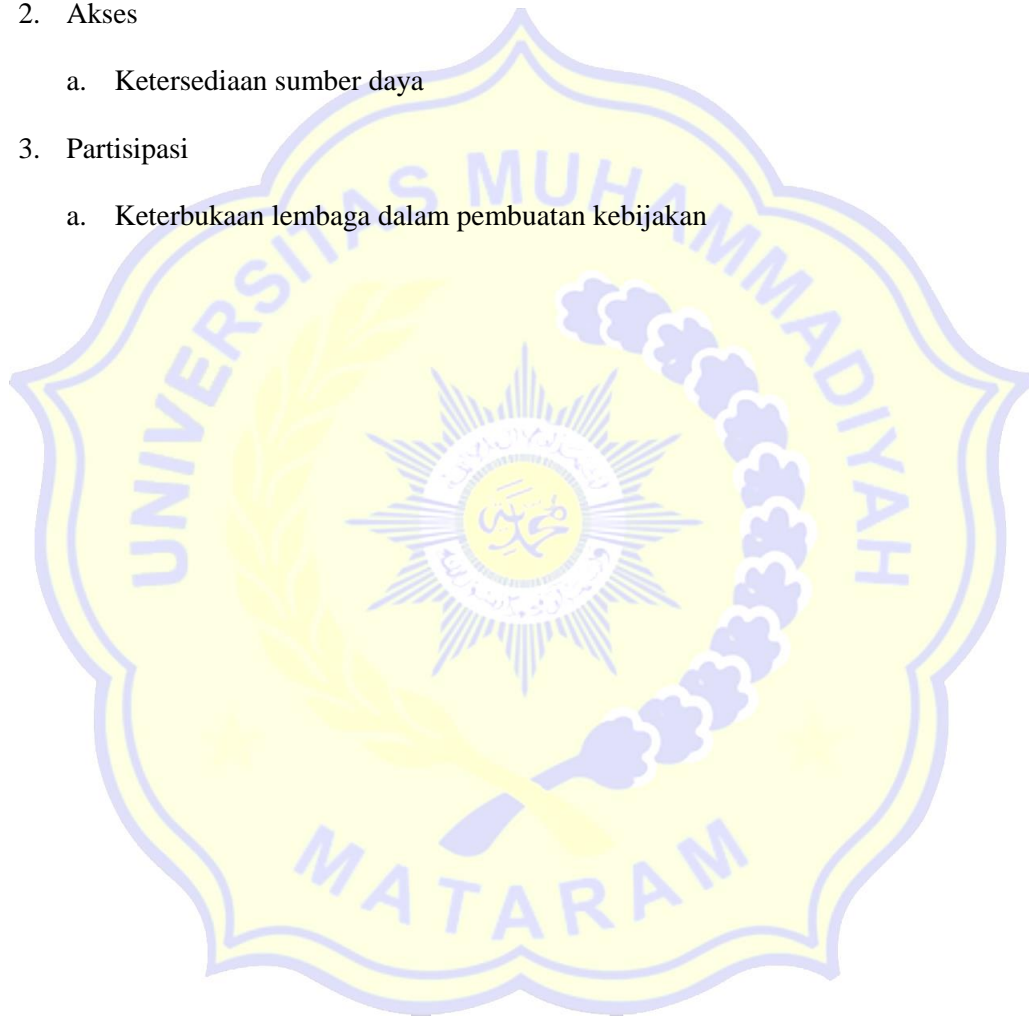
Aspek Strategi:

1. Strategi organisasi
 - a. Perumusan misi dan tujuan
 - b. Sosialisasi
2. Strategi Program
 - a. Dampak
3. Strategi pendukung sumber daya
 - a. Prasarana

- b. Sumber daya manusia

Faktor mempengaruhi pemberdayaan masyarakat:

1. Kesejahteraan
 - a. Peningkatan kualitas hidup
2. Akses
 - a. Ketersediaan sumber daya
3. Partisipasi
 - a. Keterbukaan lembaga dalam pembuatan kebijakan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Partisipasi Masyarakat dalam Megawasi Alokas Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Penulis memilih waktu penelitian pada bulan Maret 2020.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Hamid Patilima (2013:12), informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Ketua BPD
4. Anggota BPD
5. Masyarakat Desa

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan. ”sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

sepertidokumen dan lain-lain”. (Moleong 2010: 157). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2007:186), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya keterangan terkait eksistensi rekomendasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Alokasi Dana Desa.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 2008:62). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasilangsung yaitu partisipasi masyarakat dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.5 Sumber Data

Menurut Moleong (2000:114) di dalam penelitian ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat di pertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati Moleong(2005:57). Sumber data primer diperoleh dari studi lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan wawancara dan observasi. Sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui catatan tertulis dalam suatu wawancara yang dilakukan pada Informan.

Menurut Moleong (2002:90) informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Anggota tim dapat memberikan pandangan dari segi orang tentang nilai, sikap, dan kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Moleong (2006:159) data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. menyebutkan bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, dan tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data.

Moleong (2006:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3.6 Analisis Data

Dalam Moleong (2010: 287) disebutkan bahwa terdapat tiga model analisis data pada kualitatif, antara lain:

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Sugiyono, (2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat

dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchard*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclution drowing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kreadibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiono, 2013 : 91-99).